

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MEWUJUDKAN “SPORT AND TOURISM” SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Husain Mohammad^{1*} Dhea Tania Dhestyana²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Kebijakan Kepala Daerah dalam menjadikan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan “Sport and Tourism” yang dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang. “Sport and Tourism” adalah Kebijakan Politik Bupati Bogor yaitu Ibu Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. Kebijakan ini masuk kedalam program kerja Panca Karsa yang diusung oleh Bupati Kabupaten Bogor, Panca Karsa merupakan Konten yang memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tinggi, sehingga dalam hal ini Bupati Bogor melihat Potensi yang dimiliki dan harus dikembangkan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan membahas tentang prosedur atau tahapan pelaksanaan dan strategi Kebijakan “Sport and Tourism” ini. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor “Sport and Tourism” sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan. Disamping itu juga untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, Kebijakan “Sport and Tourism” dalam beberapa instrumen Pembangunan Berkelanjutan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa apabila dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “Sport and Tourism” dilakukan dengan baik dan benar dapat mempengaruhi dan memunculkan hasil bagi beberapa Instrumen Pembangunan Berkelanjutan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam mewujudkan serta meningkatkan Kebijakan “Sport and Tourism” diperlukan upaya-upaya peningkatan kerjasama sampai perlunya dukungan kebijakan seperti Peraturan Bupati maupun RIPARDA serta masyarakat sadar wisata.

Kata Kunci: branding, kebijakan, sport and tourism

Abstract

Regional Head Policy in making Bogor Regency in realizing “Sport and Tourism”. this should be spelled out in short, medium and long term programs. “Sport and Tourism” is the Political Policy of the Bogor Regent, Mrs. Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. This policy is included in the PancaKarsa work program promoted by him. Bogor Regency is a Regency that has high natural and human resources resources, so that the Bogor Regent sees the potential that is owned and must be developed. To analyze the problem above, the writer conducted an inquiry (inquiry) conducted at the Bappedalitbang Bogor District Office with the aim of finding out more about and discussing the procedures or stages of the implementation and strategy of the “Sport and Tourism” Policy. To find out how the influence of the Bogor District Government Policy “Sport

© 2022 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: h.m.assegaf@gmail.com

Received 05 February 2022, Accepted 10 February 2022, Published 15 February 2022

and Tourism" as an Instrument for Sustainable Development. To find out about the crucial obstacles in implementing the "Sport and Tourism" Policy in several Sustainable Development instruments. The results of the study show that if the implementation of the Bogor District Government Policy in Realizing "Sport and Tourism" is done properly and correctly so far. So that it can influence and bring forth results for several Sustainable Development Instruments. The conclusion obtained is that in realizing and enhancing the "Sport and Tourism" Policy, efforts are needed to increase cooperation until the need for policy support such as PerBup and RIPARDA and the tourism-conscious community.

Keywords: branding, policy, sport and tourism

Pendahuluan

Adapun pengertian atau definisi kebijakan sangatlah beragam. Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas (Muadi *et al*, 2016). Sedangkan Menurut Marwan dalam bukunya bahwa definisi kebijakan sendiri adalah berasal dari kata bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budi, pandai, atau mahir (Effendy, 2010; Hidayat, 2018), sedangkan kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (Effendy, 2010; Ismail, 2019; Rumiasari, 2021) atau dapat juga diartikan sebagai cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran (Efendi, 2013; Ginting & Muazzul, 2018).

Dalam bahasa inggris bijak artinya adalah *smart, experienced, capable*, atau *wise* sedangkan kebijakan adalah *intelligence* atau *wisdom*, atau menurut Poerwadarminta (2002), kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran dan dalam bahasa

Belanda disebut dengan *beleid*. Dari sudut bahasa, maka *policy* identik dengan *beleidregel*, artinya adalah peraturan, tata pemerintahan, atau politik.

Secara yuridis terminologi kebijakan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf a), kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Pengertian lain juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Penjelasan Pasal 1 angka 12), kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan diskresi, berdasarkan definisi dan terminologi, diskresi (*freies ermessen*) itu terbagi atas dua, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan itu dilaksanakan berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan sedangkan kebijaksanaan adalah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan namun tetap dalam koridor hukum. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktik apabila menyangkut urusan

pemerintahan maka lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

Permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dalam konteks Negara selalu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik yang merata. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Titik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi masalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai suatu tingkatan yang layak. Bagi manusia, pembangunan tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tetapi juga haruslah melihat aspek keadilan terhadap lingkungan. Lingkungan bagi umat manusia adalah salah satu modal dasar dalam pembangunan. Lingkungan sehat, bersih, lestari, secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan produktifitas manusia di masa yang akan datang. Artinya, dalam konteks tersebut selain keberlanjutan dari sisi ekonomi dan sosial, maka diperlukan juga keberlanjutan pada sisi ekologis.

Kebijakan Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini harus dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah atau panjang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan kepala daerah Kabupaten Bogor ini telah di jelaskan dalam penyusunan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan *The City of Sport and Tourism* sebagai program kerja Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Setelah sukses melaksanakan program 100 hari kerja, kini Bupati Bogor Ade Yasin fokus menggenjot pembangunan sektor olah raga dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bogor resmi melaunching "Bogor: *The City of Sport and Tourism*" yang menjadi agenda prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan dari kalangan dunia usaha/bisnis Tinton Soeprapto (Direktur PT. Sarana Sirkuitindo Utama). Bupati Bogor Ade Yasin, memaparkan dan menyampaikan potensi yang besar dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata di Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor punya 11 lapangan *golf* berskala internasional, Stadion Internasional Pakansari, Sirkuit internasional Sentul, Paralayang berstandar Internasional, lalu kita juga sedang mengembangkan kawasan Geopark Nasional Pongkor di 15 Kecamatan, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya, citacita Bogor sebagai *the City of Sport and Tourism* akan dapat terealisasi. Samsudin sebagai Staf Ahli Menpora Bidang Hukum Olahraga, sangat mengapresiasi

dan menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan sektor olahraga dan pariwisata. hal ini sejalan dengan visi misi dan program Kemenpora.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga tentunya akan mengembangkan wisata di pedesaan dengan mengadakan festival desa hingga pembangunan infrastruktur serta *venue* olahraga sebagai sarana pendukung. Untuk mendukung wisata di desa-desa maka butuh dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik oleh karena itu kami akan melanjutkan pembangunan Jalan Puncak II, Jalan Lingkar Dramaga, Jalan Bojonggede Kemang, Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong, mengurai titik-titik kemacetan dan lainnya. Serta akan menambah *venue-venue* olahraga dan *sport center* serta mengadakan secara rutin Festival Desa sebagai bagian dari promosi keunggulan 416 desa yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Maka dari itu, dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten bogor apakah dapat terealisasi dengan baik serta ada hasilnya sesuai dengan instrumen pembangunan berkelanjutan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Bogor.

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut (1) Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan "*Sport and Tourism*" (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan "*Sport and Tourism*" terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian yang dilakukan adalah dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Data primer yang digunakan di penelitian ini diperoleh dengan melalui observasi langsung ke obyek penelitian, yaitu pada Kantor Bappedalitbang kabupaten Bogor.

Data primer ini diperoleh melalui survey dilokasi penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden yang cukup mengerti mengenai permasalahan dan penyusunan penelitian ini, penelitian terhadap pengumpulan data ini meliputi *review* dokumen, bukti-bukti tertulis dan catatan-catatan yang ada diorganisasi. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder yaitu data dari luar organisasi yang dikumpulkan oleh orang lain dan telah digunakan yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini, data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya, dari studi kepustakaan dari literatur, karangan-karangan, dan tulisan lain yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.

Penulisan penelitian ini menggunakan suatu teknik analisa deskriptif inferensial, yaitu suatu teknik analisa data yang menggunakan cara dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yang ditunjang dengan penggunaan data primer maupun data sekunder serta hasil observasi wawancara dengan menggunakan *guiding interview* dari Lembaga terkait yaitu Bappedalitbang Kabupaten Bogor.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Sejarah Kabupaten Bogor pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru atau Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati (Kampung Empang sekarang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap akhlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van de Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali

zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan 'ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan'. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

1. Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.
2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.
3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertakhta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.
4. Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuweda-bhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota

sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor. Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu.



Gambar 1. Lambang Kabupaten Bogor

Dari gambar 1, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bangian inti; Kujang, jenis senjata tradisional masyarakat Sunda yang identik dengan keberanian dan keagungan Sunda di masa lampau. Kujang melambangkan keperwiraan yang berarti gambaran masyarakat Bogor yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran. Paku-

jajar, merupakan lambang keteguhan yang selalu menjadi gema tradisi bagi kerajaan Pajajaran yang pernah berpusat di Bogor. Pakujajar ini melambangkan keteguhan dalam mempertahankan tradisi dengan segala kepribadiannya dan nilai-nilai positif sebagai wujud nyata melestarikan budaya bangsa. Harupat, yang berarti sagar atau ruyung, sebagai gagang

(perah) kujang merupakan perlambang keterikatan Kabupaten Bogor dengan sejarah asal-usul nama Bogor yang berarti Kawung. Harupat juga bermakna sesuatu yang kuat, kokoh, simbol kekokohan masyarakat Bogor dalam mempertahankan jati diri. Endog (telur), yang di dalamnya terdapat Kujang, harupat, pakujajar dan warna putih melambangkan awal atau inti kehidupan yang ditandai oleh kesucian.

2. Bagian Tengah; Puncak Gunung, pada bagian tengah menunjukkan Gunung Salak dan Gunung Pangrango yang secara geografis keduanya merupakan patok batas wilayah Kabupaten Bogor di sebelah selatan. Puncak Gunung melambangkan tujuan atau cita-cita yang tinggi. Dua puncak gunung yang berbeda tingginya menggambarkan anak tangga menuju tujuan atau cita-cita. Aliran Sungai, dua aliran sungai yang mengapit anda (telur) melambangkan Sungai Ciliwung dan Cisadane mengapit Bogor. Aliran sungai mempunyai makna filosofis yang melambangkan kesuburan. Sungai Ciliwung dan Cisadane memiliki arti yang strategis bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor. Segitiga Samasisi, membingkai gunung dan sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, bermakna keutamaan. Melambangkan bahwa kesuburan dan kekayaan alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan landasan nilai-nilai keutamaan agar memperoleh kemaslahatan.
3. Bagian Luar; Lingkaran, melambangkan kesempurnaan. Artinya perjuangan hidup haruslah ditujukan ke arah kesempurnaan lahir dan bathin

tanpa cacat seperti lingkaran penuh yang merupakan proyeksi sebuah pola bumi tempat hidup manusia.

4. Makna warna; Hitam dan putih, keduanya melambangkan perjuangan hidup; Putih melambangkan kesucian, kebenaran dan kebersihan sedangkan hitam melambangkan kebathilan atau kesuraman. Kuning, merupakan warna emas, melambangkan kejayaan dan kebesaran. Hijau, digunakan sebagai warna dasar mengandung makna kesuburan. Bagi orang Sunda, hijau berarti subur. Biru, merupakan warna yang menimbulkan kesan keindahan, Seperti laut biru, gunung yang membiru. Karena itu biru melambangkan keindahan. Lambang ini bermakna bahwa Bogor sebagai daerah wisata alam memiliki keindahan alam yang mempesona.
5. Perisai; Tiga sudut dalam perisai melambangkan tiga komponen yang menentukan kesejahteraan umat di suatu kawasan atau Negara yang disebut dengan "Trinangtung di Bumi" yaitu masyarakat, ulama, cendekiawan dan pemerintahan (Umaro). Tiga garis sisi membentuk perisai, melambangkan tiga hal yaitu iman, ilmu dan amal yang merupakan benteng kehidupan umat. Perisai yang bertuliskan motto juang "Tegar Beriman" pada bagian bawahnya melambangkan tameng dan benteng yang mampu menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan hidup lahir dan bathin berupa keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Arti Rangkaian Kata; *PRAYOGA TOHAGA SAYAGA*, *Prayoga* berarti Utama, *Tohaga* berarti Kokoh dan kuat, *Sayaga* berarti sedia, siap siaga.

Prayoga Tohaga Sayaga mengandung makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

KUTA UDAYA WANGSA, *Kuta* berarti Kota, *Udaya* berarti fajar, kebangkitan atau pembangkit, *Wangsa* berarti bangsa atau suku bangsa. Ketiga kata tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya hendaklah menjadi pembangkit dan pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.

TEGAR BERIMAN, Akronim dari Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman. Tegar Beriman menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan alam daerah yang terbentuk oleh perilaku dan usaha masyarakatnya dengan landasan iman yang kokoh. Hal ini juga merupakan perwujudan dari *Prayoga Tohaga Sayaga* dan *Kuta Udaya Wangsa*. TEGAR BERIMAN merupakan motto juang Kabupaten Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1995.

Gambaran Umum Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Bappedalitbang Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Bappedalitbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappedalitbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bappedalitbang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Bappedalitbang Kabupaten Bogor

No	Pegawai	Penempatan Pegawai						Total
		Sekretariat	Rendalev	PPM	PSDA	IPW	Litbang	
1	ASN	21	11	11	11	12	12	78
2	Tenaga Kontrak	10	7	4	4	5	2	32
3	Petugas Keamanan	6	1	1	1	1	1	11
4	Petugas Kebersihan	6	1	1	1	1	1	11
Total		43	20	17	17	19	16	132

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2020

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten

Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 132

orang, yang terdiri dari 78 orang PNS dan 32 orang tenaga kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 11 orang petugas keamanan, 11 orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappedalitbang seluruhnya berjumlah 132 orang.

Hasil Wawancara di Lapangan

Berikut ini akan di kemukakan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi selaku Kepala Bagian Sumber Daya Alam di Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan pengaruh Kebijakan Pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan "*Sport and Tourism*" sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diuraikan ke dalam 6 (enam) pertanyaan, yaitu:

1. Jelaskan apa yang dimaksud Kebijakan "*Sport and Tourism*" di Kabupaten Bogor?
2. Sejak kapan program "*Sport and Tourism*" di mulai?
3. Strategi apa saja yang dilakukan?
4. Apa tujuan dari program "*Sport and Tourism*"?
5. Apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan program "*Sport and Tourism*"?
6. Adakah usulan Program dan Kegiatan?

Berdasarkan pertanyaan di atas, jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut adalah:

Pertama, Kebijakan "*Sport and Tourism*" di Kabupaten Bogor bisa di katakan sebagai salah satu kebijakan politis dari Bupati Kabupaten Bogor yang baru,

yaitu Ibu Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. Karna Bupati melihat potensi yang ada di Kabupaten Bogor, seperti Setu-Setu, Curug dan 4 Gunung yang mengelilingi Bogor. Serta topografi yang bagus untuk para *Tourist*. Bupati Kabupaten Bogor juga mempunyai program kerja Panca Karsa, serta *Sport and Tourism* termasuk di dalamnya, lebih tepatnya sekarang ini "*Sport and Tourism*" dijadikan *branding* untuk Kabupaten Bogor sebagai Kota Olahraga dan Wisata.

Kedua, Program "*Sport and Tourism*" di usung tahun 2018 setelah ditentukannya Bupati Terpilih. *Ketiga*, Ada 7 Strategi yang dilakukan dalam program ini, yaitu

1. Membangun Sarana dan Prasarana untuk "*Sport and Tourism*" seperti membuat *Track Sepeda*, *Track Sepatu Roda*, *Gelanggang Renang* yang dapat dijadikan Taraf Internasional, serta membangun dan memperbaiki fasilitas Olahraga Umum dan taman yang dapat dipergunakan masyarakat untuk berolahraga.
2. *Event "Sport and Tourism"* membuat dan menyelenggarakan *event-event "Sport and Tourism"* serta seni budaya berskala nasional maupun internasional.
3. *Publikasi dan Promosi*; Kabupaten Bogor telah mempunyai logo terbaru untuk "*Sport and Tourism*" yang rencananya akan dibuatkan *sticker* dan akan ditempel di setiap mobil pemerintah daerah yang akan mulai di realisasikan tahun ini. Serta akan di promosikan bisa melalui buku saku, kalender, peta dan yang paling mudah dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat yaitu Sosial

Media, seperti; *Instagram*, *Twitter*, *Website*, dan lain-lain.

4. Kemitraan; Berkoordinasi dengan Kementerian dan Provinsi agar didukung penuh serta meminta agar rencana program *event-event* olahraga dan pariwisata yang ada di kementerian maupun provinsi diselenggarakan di Kabupaten Bogor. Mencari sponsor-sponsor besar yang mau melaksanakan *event-event* Nasional. Lalu, berpartisipasi dalam eventevent olahraga yang diselenggarakan oleh Dispora dan Cabang Olahraga serta Bekerjasama dengan komunitas-komunitas seperti susur goa, arum jeram.
5. Paket Wisata; Menyiapkan paket-paket wisata yang mengakomodir kebutuhan para peserta *event* atau atlet beserta *crew* dan supporter yang ingin berwisata di Kabupaten Bogor, termasuk penyediaan akomodasi dan konsumsi selama berkegiatan di Kabupaten Bogor.
6. Pengembangan Budaya; Meningkatkan kualitas seni dan budaya sebagai faktor pendukung pelaksanaan *event-event* dan kegiatan wisata lainnya. Misal setiap *event* yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogor mencirikan khas nya untuk menampilkan pagelaran budaya di pembukaan acara.
7. Dukungan Kebijakan; Misalnya seperti RIPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) tentang perencanaan mengenai pengembangan "*Sport and Tourism*". RIPARDA Kabupaten Bogor belum di Perda-kan, rencana tahun 2020 akan di Perda-kan. Atau dibuat Peraturan Bupati seperti penyelenggaraan

perlombaan Olahraga se-Kecamatan Kabupaten Bogor dan kebijakan untuk mengolahragakan masyarakat dan aparatur seperti senam massal.

Keempat, untuk tujuan seperti nya masuk kedalam 10 (sepuluh) program prioritas yang kami punya, yaitu:

1. Mem-branding Kabupaten Bogor sebagai "*Sport and Tourism*".
2. Sebagai Peningkatan Destinasi pariwisata seperti *Green Tourism* atau *Ecotourism Festival* Wisata Desa.
3. Mengoptimalkan Komunitas masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata.
4. Kemitraan UMKM dengan pengelola pariwisata dan Perhotelan.
5. Meningkatkan sarana Penunjang seperti Jalan, *Landmark*, *Lettersign*, Jalur Pedestrian.
6. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan Kepariwisata, Perhotelan, Restoran, Transportasi, dan *Agency* Pariwisata.
7. Mendorong keterlibatan semua komponen untuk mempromosikan potensi pariwisata dengan mengoptimalkan media sosial dan memasang potensi pariwisata Bogor di Kantor Pemerintah dan swasta.
8. Optimalisasi Promosi melalui media sosial, Paket Wisata, *Event* Nasional dan Internasional.
9. Peningkatan kualitas pelayanan, melalui penerapan Standard Dan Uji Kompetensi sesuai ISO atau *International Organization for Standarization*.
10. Mengoptimalkan saber Pungli dan Inovasi Berkelanjutan (membuat *Icon* atau *Landmark* Bogor, Destinasi Baru, promosi dengan aplikasi.

Kelima, Kelebihan program "*Sport and Tourism*" adalah:

1. Memiliki sarana olahraga seperti 9 lapangan *golf* bertaraf internasional, Stadion Pakansari dengan *design* terbaik ke-14 Dunia, Sirkuit Sentul, *Venue* Paralayang dengan akses dan fasilitas terbaik di Indonesia, Pade-pokan Pencak Silat Cimande, Laga Tangkas, Laga Satria dan rencana pembangunan sarana olah raga lainnya.
2. Memiliki banyak potensi wisata, baik alam, budaya maupun buatan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga seperti danau, gunung, hutan, sungai, Geopark.
3. Ketersediaan akomodasi wisata yang memadai seperti hotel, restoran, dan sebagainya.
4. Dekat dengan Pusat Ibukota Negara dan bandara internasional.

Sedangkan kelemahan program "*Sport and Tourism*" adalah

1. Infrastruktur khususnya jalan yang tidak semuanya bagus menuju destinasi pariwisata.
2. Kemacetan lalu lintas.
3. Transportasi umum yang kurang nyaman.
4. Kurangnya fasilitas olah raga untuk masyarakat seperti jalur pejalan kaki, *track* sepeda.
5. Kurangnya kegiatan atau *event* pariwisata rutin yang menyedot kunjungan dari luar Kabupaten Bogor.

Keenam, usulan kegiatan dan program diantaranya adalah:

1. Program Pengembangan Destinasi "*Sport and Tourism*" yang terdiri dari: (1) Menyusun rencana induk "*Sport and Tourism*", (2) Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana wisata olah raga. (3) Memfasilitasi penyusunan kebijakan dalam rangka pengembangan "*Sport and Tourism*". (4) Sosialisasi Kabupaten Bogor "*Sport and Tourism*" kepada para pelaku pariwisata.
2. Program Pengembangan Kemitraan "*Sport and Tourism*" yang terdiri dari (1) Fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. (2) Melaksanakan penyuluhan sadar wisata berkaitan dengan "*Sport and Tourism*" kepada masyarakat dan aparat. (3) Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung "*Sport and Tourism*". (4) Peningkatan kualitas SDM yang berkaitan dengan "*Sport and Tourism*".
3. Penyelenggaraan event dan promosi yang terdiri dari (1) *Tour de Pongkor*, (2) *Bogor Wonderful Golf*, (3) Festival Seni dan Beladiri Silat, (4) Kejuaraan Paralayang, (5) Kejuaraan Balap Motor atau mobil. (6) *Bogor Fun & Run Festival* bertaraf Internasional dan nasional. (7) Kejuaraan *Down Hills* bertaraf Internasional dan nasional. (8) "Petik Teh" Festival bertaraf Internasional dan Nasional. (9) *Bogor Clean & Clear Camp* sebagai Program bebersih Gunung. (10) *Cross Country*. (11) *International Setu Kayak*. (12) Internasional atau Nasional Ciliwung Cisadane *Rafting*. (13) *Jazz Gunung International*. (14) Wisata Rally bertaraf Internasional dan nasional. (15) *Salak/Pangrango Offroad 4x4* bertaraf Internasional dan nasional. (16) *Jambore Otomotif*. Se jauh ini kurang lebih

itu yang menjadi Usulan Program dan Kegiatan bagi Kebijakan Kabupaten Bogor “*Sport and Tourism*” berharap satu persatu dapat terealisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “*Sport and Tourism*” bertujuan untuk mem-branding kembali Kabupaten Bogor agar menjadi Kabupaten Bogor yang mempunyai minat Pariwisata yang tinggi serta menjadi Kabupaten yang lengkap dengan sarana dan prasarana kebutuhan olahraga.
2. *Sport and Tourism* ini dapat dikatakan sebagai Kebijakan Politis dari Bupati terpilih tahun 2018 yaitu Ibu Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. yang melihat banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor ini dan dapat dimasukkan ke dalam Program Panca Karsa yaitu Bogor Membangun, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Sehat, dan Bogor Keberadaban.
3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Mewujudkan “*Sport and Tourism*” ini terdapat beberapa kekurangan, seperti Infrastruktur khususnya jalan yang tidak semuanya bagus menuju destinasi pariwisata, Kemacetan lalu lintas, Transportasi umum atau Akomodasi yang masih kurang nyaman, Kurangnya fasilitas olahraga untuk masyarakat (jalur pejalan kaki, track sepeda), Kurangnya kegiatan atau event pariwisata rutin yang menyedot kunjungan dari luar Kabupaten.
4. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

dalam mewujudkan “*Sport and Tourism*” ini telah bekerja sama dengan Badan atau Dinas Seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Olahraga, dan Masyarakat.

Referensi

- Budiono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. PBF. Yogyakarta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington
- Effendi, Marwan. 2013. *Teori Hukum Dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan harmonisasi Hukum Pidana*. Refrensi. Jakarta
- Effendy, M., 2010. Apakah suatu kebijakan dapat dikriminalisasi? (Dari perspektif hukum pidana atau korupsi). *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4). pp. 21-36
- Fahmi Amrusi, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia. Bandung
- Gibson, James L dan John M. Ivancevich, 1995. *Organisasi & Manajemen*. Erlangga. Jakarta
- Ginting, H. and Muazzul, M., 2018. Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), pp.32-40.
- Hidayat, T.A., 2018. Reformulasi tindak pidana korupsi dalam kaitan rendahnya realisasi keuangan negara dikarenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), pp. 59-70.
- Inu Kencana Syafie, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Jakarta
- Ismail, M., 2019. Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), pp.117-134.
- James E. Anderson, 1984. *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston. New York
- Muadi, S., MH, I. and Sofwani, A., 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), pp.195-224.
- Neuman. W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks. Jakarta
- Nugraha, G. Setya, R dan Maulina F. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Karima. Surabaya
- Poerwadarminta, WS. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Rumiasari, M., 2021. Konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), pp.101-116.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. Jakarta
- Siagan P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tikson, T. Deddy, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Gemilang Persada. Makassar